



**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN  
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA  
PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA  
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DENPASAR KELAS I A**

**TRIWULAN IV  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN SURVEI  
INDEKS PERSEPSI KORUPSI  
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN  
DI  
PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA  
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DENPASAR KELAS I A**

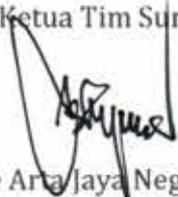
**Berdasarkan Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona  
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah  
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi  
Pemerintah**

Disahkan di Denpasar  
Pada hari : Senin, 8 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A,

  
Nyoman Wiguna, S.H., M.H.  
NIP. 197012201996031002

Ketua Tim Survei,

  
I Made Arta Jaya Negara, S.H., M.H.  
NIP. 196909071991031006

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	4
1.3. Landasan Hukum .....	5
1.4. Rencana Kerja.....	5
<b>BAB II</b> .....	7
<b>METODOLOGI</b> .....	7
2.1. Metode Penelitian.....	7
2.2. Populasi Dan Sampel.....	7
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis .....	7
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control .....	7
2.5. Teknik Analisis Data .....	8
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	8
<b>BAB III</b> .....	10
<b>INDEKS PERSEPSI KORUPSI</b> .....	10
3.1. Profil responden.....	10
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator .....	13
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan .....	23
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	24
<b>BAB IV</b> .....	25
<b>PENUTUP</b> .....	25
4.1. Kesimpulan.....	25
4.2. Rekomendasi .....	25
Lampiran.....	25

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

#### **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi

pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

### **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

### **1.4. Rencana Kerja**

#### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana  
Survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  - a. Kuesioner.
  - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- a. Jumlah Responden.
- b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
- Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

#### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **1.4.3. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu setiap bulan, triwulan, dan semester. Pada laporan ini, survei dilaksanakan pada Triwulan IV yakni pada bulan Oktober-Desember 2023 .

## **BAB II METODOLOGI**

### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

### **2.2. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

### **2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

### **2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan atau data

minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

## 2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas**



**Tabel 2**  
**Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

**BAB III**  
**INDEKS PERSEPSI KORUPSI**

**3.1. Profil responden**

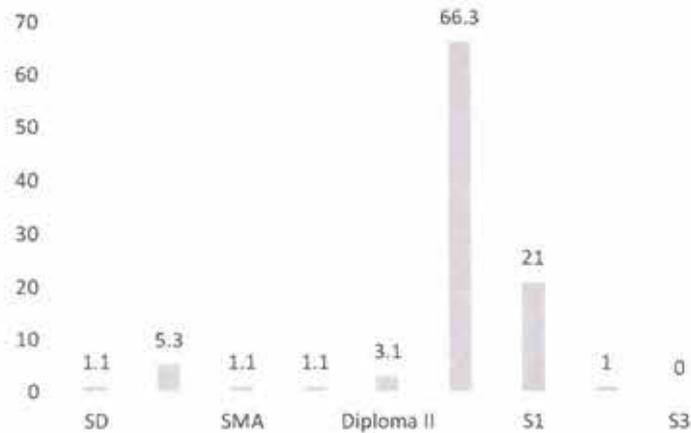
**3.1.1. Tingkat pendidikan responden**

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar tingkat S1 sebesar 66.3%.

**Tabel 4.**  
**Tingkat Pendidikan Responden**  
Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	0	0.0	0.0	0.0
	SMP	1	1.1	1.1	1.1
	SMA	5	5.3	5.3	6.4
	Diploma I	1	1.1	1.1	7.5
	Diploma II	1	1.1	1.1	8.6
	Diploma III	3	3.1	3.1	11.7
	S1	63	66.3	66.3	78.0
	S2	20	21.0	21.0	99.0
	S3	1	1.0	1.0	100.0
	Total	95	100	100	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



**Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden**

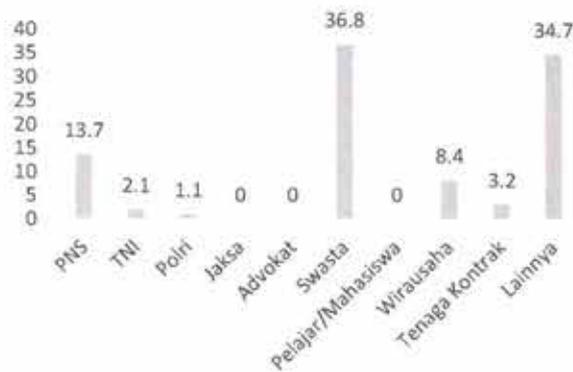
### 3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 36.8 % responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai Swasta.

**Tabel 5.**  
**Jenis Pekerjaan Responden**  
Pekerjaan Utama

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	13	13.7	13.7	13.7
	TNI	2	2.1	2.1	15.8
	Polri	1	1.1	1.1	16.9
	Jaksa	0	0.0	0.0	16.9
	Advokat	0	0.0	0.0	16.9
	Swasta	35	36.8	36.8	53.7
	Pelajar/Mahasiswa	0	0.0	0.0	53.7
	Wirausaha	8	8.4	8.4	62.1
	Tenaga kontrak	3	3.2	3.2	65.3
	Lainnya	33	34.7	34.7	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



**Grafik 2. Jenis Pekerjaan Responden**

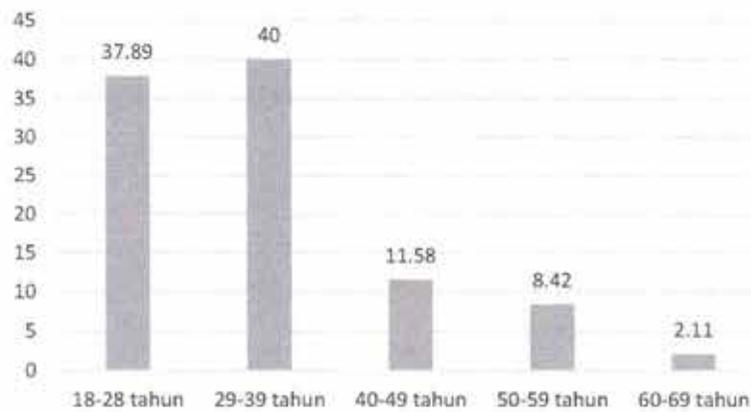
### 3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia 29 s/d 39 tahun sebesar 40.00%.

**Tabel 6.**  
**Usia Responden**  
Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18-28 tahun	36	37.89	37.89	37.89
	29-39 tahun	38	40.00	40.00	77.89
	40-49 tahun	11	11.58	11.58	89.47
	50-59 tahun	8	8.42	8.42	97.89
	60-69 tahun	2	2.11	2.11	100.0
	Total	101	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



**Grafik 3. Usia responden**

### 3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

#### 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

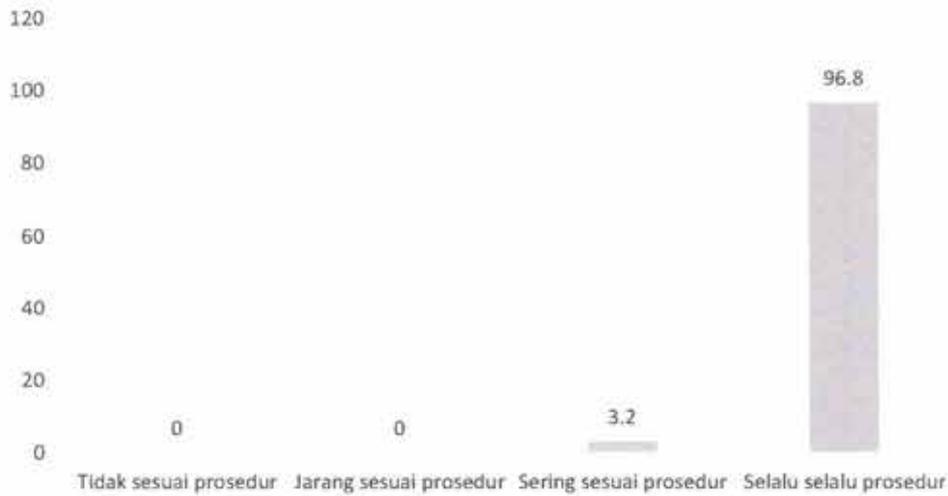
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3.968. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

**Tabel 7.**  
**Indeks pada indikator manipulasi peraturan**  
**Manipulasi Peraturan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak sesuai prosedur	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang sesuai prosedur	0	0.0	0.0	0.0
	Sering sesuai prosedur	3	3.2	3.2	3.2
	Selalu selalu prosedur	92	96.8	96.8	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :

**Grafik 4. Manipulasi Peraturan**



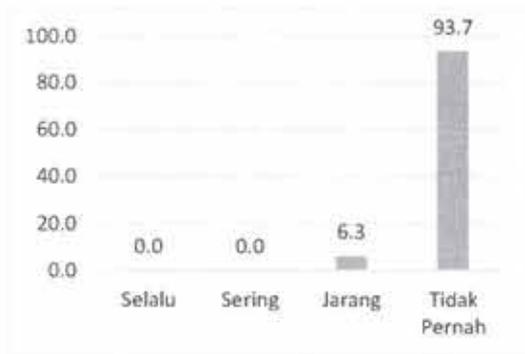
**3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 3.937 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

**Tabel 8.  
Indeks pada penyalahgunaan jabatan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu	0	0.0	0.0	0.0
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	6	6.3	6.3	6.3
	Tidak Ada	89	93.7	93.7	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



**Grafik 5. Penyalahgunaan Jabatan**

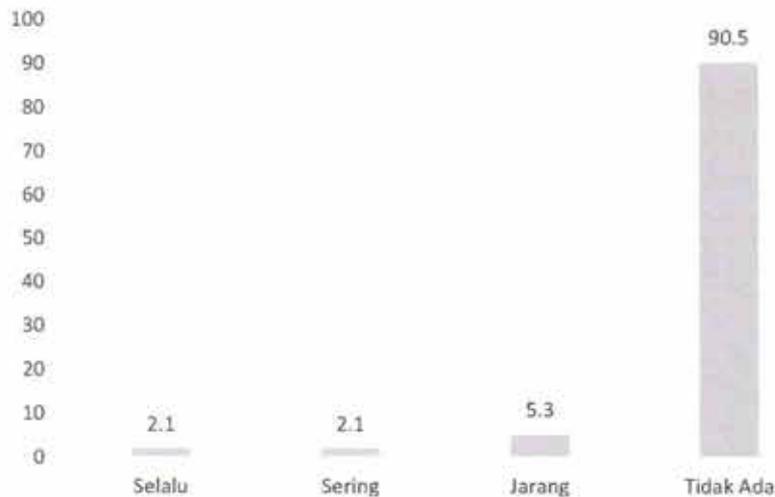
### 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3.842, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

**Tabel 9.**  
**Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh**  
**Menjual Pengaruh**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu	2	2.1	2.1	2.1
	Sering	2	2.1	2.1	4.2
	Jarang	5	5.3	5.3	9.5
	Tidak Ada	86	90.5	90.5	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



**Grafik 6. Menjual Pengaruh**

### 3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3.979, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

**Tabel 10.**  
**Indeks pada Indikator Transparansi Biaya**  
**Transparansi Biaya**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	0	0.0	0.0	0.0
	Sering	2	2.1	2.1	2.1
	Selalu	93	97.9	97.9	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



**Grafik 7. Transparansi Biaya**

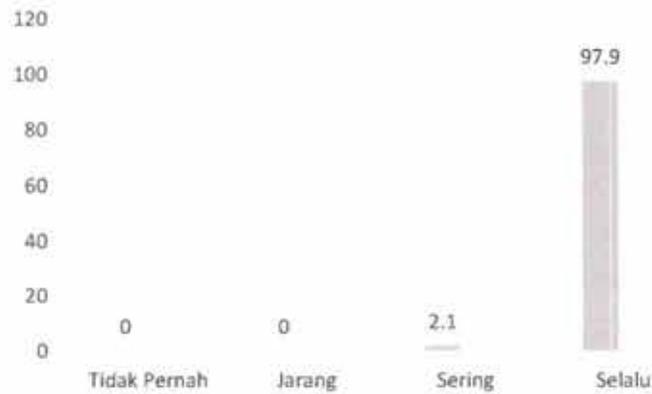
### 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3.979 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

**Tabel 11.**  
**Indeks pada Indikator Tambahan Biaya**  
**Biaya Tambahan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	0	0.0	0.0	0.0
	Sering	2	2.1	2.1	2.1
	Selalu	93	97.9	97.9	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



**Grafik 9. Tambahan Biaya**

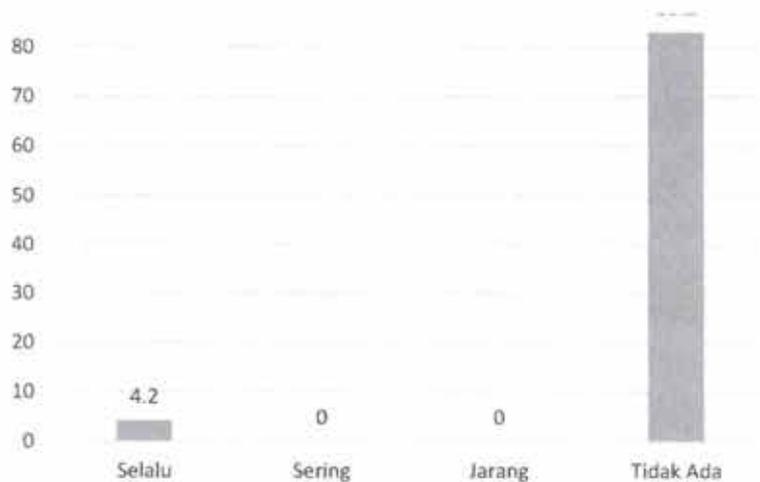
### 3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3.747 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

**Tabel 12.**  
**Indeks pada Indikator Hadiah**  
**Hadiah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu	4	4.2	4.2	4.2
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	12	12,6	12,6	16.8
	Tidak Ada	79	83.2	83.2	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



**Grafik 10. Hadiah**

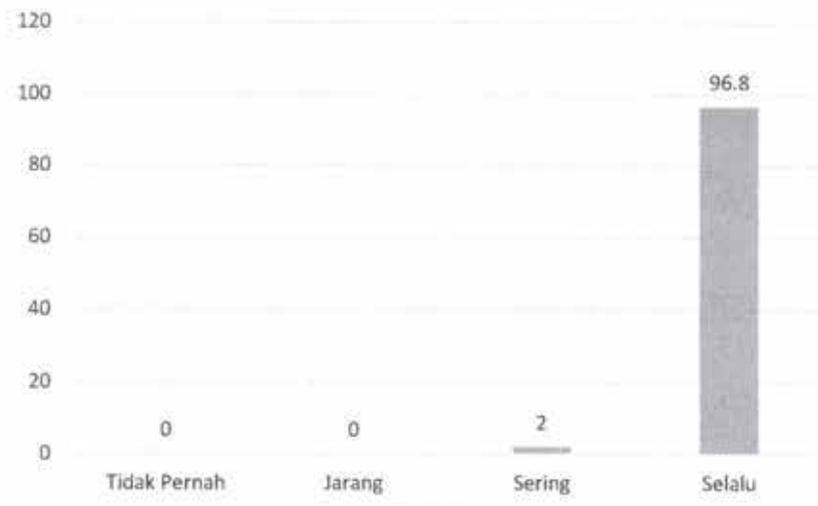
**3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3.968. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

**Tabel 13.**  
**Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	0	0.0	0.0	0.0
	Sering	3	2.0	2.0	2.0
	Selalu	92	96.8	96.8	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



**Grafik 11. Transparansi Pembayaran**

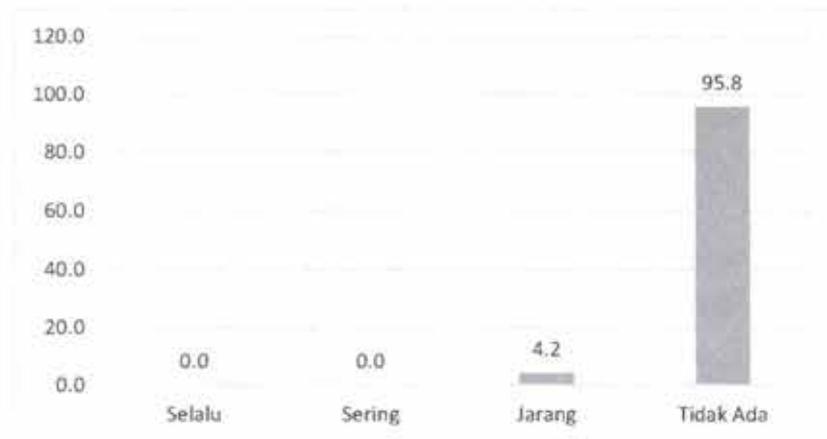
### 3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3.958. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

**Tabel 14.  
Indeks pada Indikator Percaloan  
Percaloan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu	0	0.0	0.0	0.0
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	4	4.2	4.2	4.2
	Tidak Ada	91	95.8	95.8	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



**Grafik 12. Percaloan**

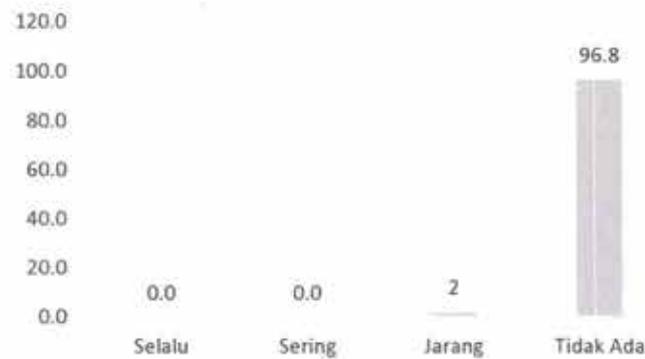
### 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3.968. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

**Tabel 15.**  
**Indeks pada Indikator Perbuatan Curang**  
**Perbuatan Curang**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu	0	0.0	0.0	0.0
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	3	2.0	2.0	2.0
	Tidak Ada	92	96.8	96.8	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



**Grafik 13. Perbuatan Curang**

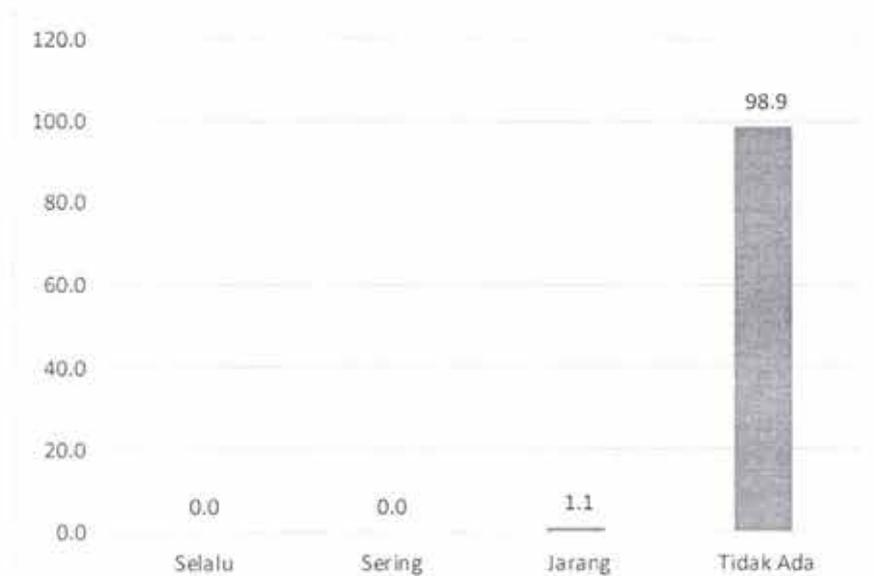
**3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3.989. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

**Tabel 16.**  
**Tabel Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia**  
**Transaksi Rahasia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu	0	0.0	0.0	0.0
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	1	1.1	1.1	1.1
	Tidak Ada	94	98.9	98.9	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



**Grafik 8. Transaksi Rahasia**

### 3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Denpasar sebesar 3,934/98.34%.

**Tabel 17.**

**Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Denpasar**

No	Ruang lingkup	Nilai Rata-rata
1	Manipulasi Peraturan	3.968
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.937
3	Menjual Pengaruh	3.842
4	Transparansi Biaya	3.979
5	Biaya Tambahan	3.979
6	Hadiah	3.747
7	Transparansi Pembayaran	3.968
8	Percaloan	3.958
9	Perbuatan Curang	3.968
10	Transaksi Rahasia	3.989

Indeks 3,934/98.34% tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai

interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 - 100

**Tabel 18.**  
**Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan**  
**Negeri Denpasar**

<b>NILAI PERSEPSI</b>	<b>NILAI INTERVAL</b>	<b>NILAI INTERVAL KONVERSI IPK</b>	<b>MUTU</b>	<b>KINERJA</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

#### **3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Denpasar diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Denpasar memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,934/98.34%. atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3.968
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3.937
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3.842
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3.979
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3.747
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3.968
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3.968
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3.958
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3.968
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3.989

### **4.2. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Denpasar pada Triwulan IV Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki indeks di atas 3,934/98.34% atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya, disusul dengan indikator menjual pengaruh dan penyalahgunaan jabatan. Oleh karenanya peningkatan pelayanan dengan inovasi-inovasi terbaru lainnya diperlukan untuk itu.

## ANALISIS DATA INDEKS PERSEPSI KORUPSI



**PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jl. Panglima Besar Jendral Sudirman No.1  
Telp/Fax (0361)224327 Denpasar 80113

No. Resp	NILAI RUANG LINGKUP										Keterangan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
117	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
118	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
122	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
123	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
127	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
128	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
129	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	
130	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
131	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
132	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
133	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	
134	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	
135	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
136	4	4	2	4	4	1	4	4	4	4	
137	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
138	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
139	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
140	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
141	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
142	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
143	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	



Jumlah	377	374	365	378	378	356	377	376	377	379	
NRR per RL	3,968	3,937	3,842	3,979	3,979	3,747	3,968	3,958	3,968	3,989	
NRR Tertimbang	0,397	0,394	0,384	0,398	0,398	0,375	0,397	0,396	0,397	0,399	3,934 *)
<b>IPK Unit Pelayanan</b>											<b>98,34 **)</b>

**Keterangan :**

RL	= Ruang Lingkup Pelayanan
- NRR	= Nilai rata-rata
- IKM	= Indeks Kepuasan Masyarakat
- *)	= Jumlah NRR IKM tertimbang
- **)	= Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per RL	= Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang	= NRR per ruang lingkup x 0.111

<b>IPK UNIT PELAYANAN : 98,34</b> <b>Kategori: BERSIH DARI KORUPSI</b>
---

**Mutu :**

<b>1 (Tidak bersih dari korupsi)</b>	: 1,00 - 1,75	: 25 - 43,75
<b>2 (Kurang bersih dari korupsi)</b>	: 1,76 - 2,50	: 43,76 - 62,50
<b>3 (Cukup bersih dari korupsi)</b>	: 2,51 - 3,25	: 62,51 - 81,25
<b>4 (Bersih dari korupsi)</b>	: 3,26 - 4,00	: 81,26 - 100,00

by: dianplus - phone +6281804181947

**Tabel**

**RINGKASAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI**

<b>Indeks Persepsi Korupsi:</b>
<b>98,34</b> Kategori: BERSIH DARI KORUPSI

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3,968	Sangat Baik	4
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,937	Sangat Baik	8
3	Menjual Pengaruh	3,842	Sangat Baik	9
4	Transparansi Biaya	3,979	Sangat Baik	2
5	Biaya Tambahan	3,979	Sangat Baik	2
6	Hadiah	3,747	Sangat Baik	10
7	Transparansi Pembayaran	3,968	Sangat Baik	4
8	Percaloan	3,958	Sangat Baik	7
9	Perbuatan Curang	3,968	Sangat Baik	4
10	Transaksi Rahasia	3,989	Sangat Baik	1

### Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi

